

KECENDERUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN BULELENG PERIODE 2009-2013

Ni Luh Ayu Sugiantini

Jurusan Pendidikan Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : ayusugiantizz@gmail.com

Abstrak

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu indikator kunci sumbangan pemerintah pusat ke daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan realisasi dana alokasi khusus, belanja modal kabupaten dan hubungan dari dana alokasi khusus dengan belanja modal pada Kabupaten Buleleng periode 2009-2013.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif, dengan subjek penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan objek penelitian adalah dana alokasi khusus dan belanja modal tahun 2009-2013. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan metode analisis trend.

Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) realisasi dana alokasi khusus Pemerintah Kabupaten Buleleng berfluktuatif dari tahun 2009-2013. (2) belanja modal Pemerintah Kabupaten Buleleng berfluktuatif dari tahun 2009-2013. Hal ini menunjukan bahwa adanya kecenderungan peningkatan dana alokasi khusus dan belanja modal dari tahun 2009-2013 di Kabupaten Buleleng.

Kata Kunci : Belanja modal dan dana alokasi khusus.

Abstract

Special Allocation Fund (DAK) is one of the key indicators of the central government contribution to the area. This study aims to determine the tendency of realization of special allocation funds, the district capital expenditures and the relationship of the special allocation fund with capital expenditure in Buleleng 2009-2013.

This study uses a quantitative descriptive design, with research subjects, namely the Government of Buleleng, with the object of research is the special allocation fund and capital expenditures in 2009-2013. Data collected by the methods of documentation and interviews. Data analysis was conducted using trend analysis.

Results of research addressing that (1) the realization of a special allocation fund Government of Buleleng increase fluctuated from year 2009-2013. (2) Government capital expenditure increased Buleleng fluctuated from year 2009 to 2013. This shows that the trend of increased specific allocation of funds and the capital expenditure of the year 2009-2013 in Buleleng.

Keywords: Capital expenditures and special allocation funds .

PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi, kota maupun kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, 2008).

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan pembangunannya, hal ini menimbulkan perbedaan pembangunan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu untuk mengatasi perbedaan ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Pemerintah Kabupaten Buleleng lebih banyak mengalokasikan belanjanya untuk belanja operasi yaitu belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pada tahun 2011 dari anggaran belanja daerah 84,68% digunakan untuk belanja operasi, 0,32% digunakan untuk belanja tidak terduga dan rata-rata hanya 15% yang digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengadaan aset untuk investasi dalam meningkatkan pelayanan publik (www.balipost.com). Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal maka perlu diketahui variabel yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal, salah satu yang paling berkorelasi positif yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) (Kurniawan, 2012).

Berdasarkan pengamatan awal pada laporan realisasi APBD pada Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir dari tahun 2009-2013 diperoleh bahwa realisasi DAK tidak pernah mencapai target. Rata-rata realisasi DAK dari tahun 2009-2013 adalah 64,34%, realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 31,36% dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 95,92%. Begitu juga halnya

realisasi belanja modal pemerintah yang tidak pernah mencapai target selama kurun waktu 2009-2013. Rata-rata realisasi Belanja Modal Pemerintah selama kurun waktu 2009-2013 mencapai 70,98%, realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 48,73% dan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 92,22%. Realisasi DAK tidak pernah mencapai target disebabkan oleh karena pemerintah pusat yang melakukan transfer ke daerah secara berkala dan bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan. Pada bulan Desember, pemerintah pusat juga tetap melakukan transfer ke pemerintah daerah. Penyaluran dana transfer ke daerah yang mendekati akhir tahun anggaran disinyalir memberikan sumbangan signifikan terhadap rendahnya realisasi DAK atau penyerapan anggaran sehingga terbentuknya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di daerah.

Tentunya ada faktor lain yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran pada APBD, antara lain adanya permasalahan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya manajemen kas daerah. Manajemen kas daerah dan transfer ke daerah sangat erat hubungannya (Dirjen Perimbangan Keuangan, 2013). Kecilnya sumber pendapatan asli daerah menyebabkan pemerintah Kabupaten Buleleng sangat tergantung dari dana perimbangan (dana transfer pemerintah pusat) untuk membiayai semua pengeluaran pemerintah, sehingga hal ini juga akan mempengaruhi realisasi dari anggaran belanja pemerintah khususnya Belanja Modal, dimana persentase realisasi pada DAK berbanding lurus dengan persentase realisasi Belanja Modal. Selain itu dengan keadaan geografis yang menempatkan Kabupaten Buleleng sebagai Kabupaten terluas di Bali menyebabkan Kabupaten Buleleng harus mengalokasikan Belanja Modal yang tinggi untuk bisa mensupport pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng.

DAK diperuntukan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena untuk menguji kebenaran temuan penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2012) yang menunjukkan bahwa DAK berkorelasi positif dengan belanja modal. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka dipandang perlu melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul “kecendrungan dana alokasi khusus (DAK) dengan belanja modal di Kabupaten Buleleng periode 2009-2013”.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Pasal 1 angka 23 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pusat dan keuangan daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dilokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.” Undang-Undang No.32 Pasal 162 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di lokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai tujuan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Menurut UU No 25 Tahun 1999, DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dalam dana APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di

gunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Menurut Standar Akutansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari suatu periode akutansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pengertian Belanja Modal yang dikemukakan oleh Halim (2004), Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi dari satu tahun anggaran akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Menurut peraturan Direktur Jendral (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER -33/PB/2008 yang dimaksud dengan belanja modal adalah sebagai berikut, Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akutansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan menganalisa angka berupa angka-angka dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data apa adanya. Burhan Bungin (2004:36) menyatakan bahwa “penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian itu berdasarkan

apa yang terjadi". Subjek dalam penelitian ini adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Pemerintah Kabupaten Buleleng dan yang menjadi Objek dalam penelitian ini adalah DAK dan belanja modal pada Kabupaten Buleleng. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif Data yang dimaksud adalah data dana alokasi khusus (DAK) dan belanja modal. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi dan tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut yakni data runtut waktu (time series) berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Akhir (Triwulan IV) DAK pada BAPPEDA Kabupaten Buleleng periode 2009 – 2013. Data DAK berupa anggaran, realisasi dan persentase realisasi DAK dari tahun 2009-2013, (1) data dana alokasi khusus berupa anggaran, realisasi dan persentase realisasi DAK dari tahun 2009-2013, (2) data belanja modal berupa anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Modal tahun 2009-2013.

Penelitian ini dilakukan pada BAPPEDA Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen laporan realisasi APBD Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan data DAK dan belanja modal periode 2009-2013. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber. Menurut Esteborg (dalam Sugiono, 2010:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonotasikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode wawancara sering juga disebut dengan metode *interview*. Unsur yang harus dipenuhi dalam menggunakan metode ini adalah adanya

pewawancara dan diwawancarai. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara dengan kepala BAPPEDA. Langkah – langkah pengumpulan data : (1) Peneliti mengajukan surat ijin penelitian kepada BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Buleleng. (2) Setelah mendapat ijin penelitian, peneliti meminta rekap data laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng, (3) Pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buleleng, peneliti melihat pada bagian besaran anggaran, realisasi dan persentase realisasi Belanja Modal pada tahun 2009-2013 dan membuatnya dalam bentuk tabel. Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus peneliti melihat hasil rekapan triwulan ke IV dari tahun 2009-2013 pada BAPPEDA Pemerintah Kabupaten Buleleng, peneliti melihat besaran anggaran, realisasi dan persentase realisasi dari Dana Alokasi Khusus tiap tahunnya dan menuangkannya dalam bentuk tabel untuk kemudian dianalisis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis trend untuk menganalisa kecenderungan dana alokasi khusus dan belanja modal di Kabupaten Buleleng dari tahun 2009-2013. Analisis trend merupakan analisis laporan keuangan yang dinyatakan dalam persentase tertentu, analisis ini dilakukan dari periode ke periode sehingga akan terlihat apakah ada perubahan yaitu naik, turun atau tetap serta berapa besar perubahan tersebut yang dihitung dalam persentase.

$$\text{Trend}_{(dak)} = R_{p(thx)} - R_{p(thx-1)}$$
$$\text{Rasio} = (R_{p_{thx}} : R_{p_{thx-1}}) \cdot 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kecenderungan Realisasi DAK Pada Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013.

Tabel 1 DAK rencana & realisasi pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013

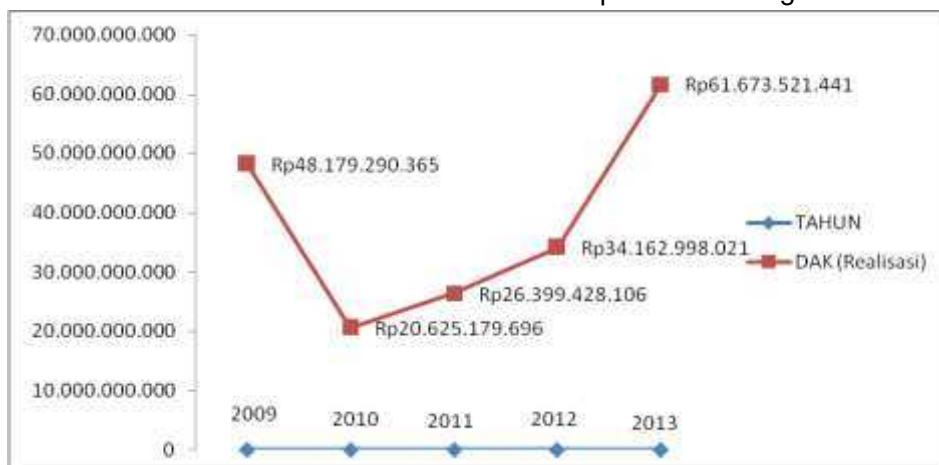
TAHUN	DAK (Rencana)	DAK (Realisasi)	%
2009	Rp 50.231.000.000	Rp 48.179.290.365	95,92
2010	Rp 65.768.200.000	Rp 20.625.179.696	31,36
2011	Rp 54.719.000.000	Rp 26.399.428.106	48,25
2012	Rp 62.589.200.000	Rp 34.162.998.021	54,58
2013	Rp 67.312.020.000	Rp 61.673.521.441	91,62

Berdasarkan tabel 1 tersebut tampak bahwa realisasi dana alokasi khusus tidak pernah mencapai target, berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa penyebabnya karena adanya keterlambatan pencairan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat, Untuk lebih jelasnya kecenderungan tersebut dapat dilihat seperti grafik dibawah ini. Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2009 ke 2010 realisasi dana alokasi khusus terjadi penurunan, hal ini karena rendahnya serapan anggaran dana alokasi khusus, dan banyaknya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Rendahnya serapan anggaran dana alokasi khusus di tahun 2010 mempengaruhi pemerintah

merencanakan anggaran dana alokasi khusus pada tahun 2011 lebih rendah dari tahun 2010 untuk meningkatkan serapan anggaran sehingga terjadi peningkatan realisasi dana alokasi khusus di tahun 2011. Setelah terjadi peningkatan serapan dana alokasi khusus, pemerintah meningkatkan rencana anggaran dana alokasi khusus di tahun 2012 dan 2013 dan di ikuti dengan peningkatan serapan dana alokasi khusus sehingga realisasi dana alokasi khusus meningkat dari tahun 2011 hingga 2013. Meningkatnya secara drastis realisasi anggaran tahun 2013 karena program yang direncanakan sesuai rencana dan program pembangunan infrastruktur selesai pada tahun 2013.

Grafik 1

Grafik realisasi Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013.



Berdasarkan grafik 1 realisasi DAK Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun

2009-2013, maka dapat diketahui bahwa kecenderungan dana alokasi khusus dari

tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun terlihat di grafik adanya penurunan realisasi DAK dari tahun 2009 ke tahun 2010. Kecenderungan peningkatan realisasi dana alokasi khusus dari tahun ke tahun disebabkan oleh karena peningkatan pembangunan infrastruktur, biaya kesehatan, pendidikan dan biaya – biaya lainnya yang dibiayai oleh pemerintah pusat. Peningkatan ini dituang dalam rencana anggaran dana alokasi khusus dalam rencana anggaran dan belanja daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan grafik 1 terlihat bahwa pada tahun 2010 realisasi dana alokasi khusus terjadi penurunan, hal ini karena rendahnya serapan anggaran dana alokasi khusus, ini terjadi karena

banyaknya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Rendahnya serapan anggaran dana alokasi khusus di tahun 2010, menyebabkan pemerintah merencanakan anggaran dana alokasi khusus pada tahun 2011 lebih rendah dari tahun 2010. Setelah terjadi peningkatan serapan dana alokasi khusus, pemerintah meningkatkan rencana anggaran dana alokasi khusus di tahun 2012 dan 2013, begitu juga dengan realisasi yang terlihat meningkat dari tahun 2010 hingga 2013.

Kecenderungan Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013.

Tabel 2 Rencana dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013

TAHUN	Belanja Modal (Rencana)	Belanja Modal (Realisasi)	%
2009	Rp 111.080.376.997	Rp 102.442.037.786	92,22
2010	Rp 96.877.753.582	Rp 47.207.570.278	48,73
2011	Rp 166.597.158.436	Rp 121.895.911.203	73,17
2012	Rp 143.962.336.094	Rp 79.433.838.374	55,18
2013	Rp 217.136.222.603	Rp 185.896.716.620	85,61

Berdasarkan tabel 2 tersebut tampak bahwa realisasi belanja persentase tertinggi dari realisasi belanja modal terjadi pada Tahun 2009, terendah pada Tahun 2010. Kecilnya alokasi belanja modal pemerintah daerah disebabkan oleh karena sebagian besar anggaran belanja dipakai untuk belanja pegawai. Selain itu capaian realisasi belanja modal yang tidak pernah mencapai penyerapan anggaran yang maksimal disebabkan oleh permasalahan teknis dilapangan seperti adanya penundaan proyek pembangunan infrastruktur. Untuk lebih jelasnya kecenderungan tersebut dapat dilihat seperti grafik dibawah ini.

Berdasarkan grafik 2 mengenai realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013, maka dapat diketahui bahwa kecenderungan realisasi Belanja Modal

Pemerintah Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun berfluktuatif, dengan realisasi Belanja Modal terendah terlihat pada tahun 2010 sebesar Rp. 47 milyar, dan belanja modal tertinggi Rp. 185 milyar. Berdasarkan grafik 2 terlihat bahwa pada tahun 2010 realisasi belanja modal terjadi penurunan, hal ini karena rendahnya serapan anggaran belanja modal, ini terjadi karena banyaknya program yang tidak berjalan sesuai rencana. Rendahnya serapan anggaran belanja modal di tahun 2010, menyebabkan pemerintah merencanakan anggaran belanja modal pada tahun 2011 lebih tinggi dari tahun 2010. Setelah terjadi peningkatan serapan belanja modal, pemerintah meningkatkan rencana anggaran belanja modal di tahun 2013, begitu juga dengan realisasi yang terlihat meningkat dari tahun 2010 hingga 2013. Peningkatan secara

drastis anggaran dan realisasi belanja modal di tahun 2013 ini karena banyaknya program pembangunan infrastruktur di tahun 2013 yang telah terselesaikan

sehingga terjadi peningkatan anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja modal.

Grafik 2
Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013



Berdasarkan grafik 2 realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013, maka dapat diketahui bahwa kecenderungan realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan belanja modal pemerintah dari tahun ke tahun diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus membuat rencana belanja modal meningkat dari tahun ke tahun, sehingga jika terjadi serapan anggaran yang sesuai rencana akan membuat kecenderungan peningkatan realisasi belanja modal dengan tujuan akhir yang diinginkan pemerintah adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi pemerintah dari tahun ke tahun.

Pembahasan Kecenderungan Realisasi DAK Pada Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013.

Dana alokasi khusus memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, peningkatannya bersifat fluktuatif. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang dialokasikan dari APBN

untuk mendanai hal-hal khusus seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan,

infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kelautan dan

perikanan, pertanian, lingkungan hidup, program keluarga berencana dan kehutanan. Untuk membiayai semua program khusus tersebut harus mendapat bantuan dana perimbangan melalui DAK dari pemerintah pusat, hal ini karena setiap daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga pemerintah pusat membantu memberikan bantuan dana melalui dana perimbangan, hal inilah menjadi penyebab peningkatan secara fluktuatif dana alokasi khusus.

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh BAPPENAS (2011) bahwa untuk meningkatkan efektifitas pembangunan daerah, pemerintah memberikan bantuan dana berupa dana alokasi khusus kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskalnya rendah, dimana sebagian besar DAU (Dana Alokasi Umum) habis terpakai untuk gaji pegawai. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang sangat mengharapkan dana alokasi khusus untuk pembangunan daerah, oleh karena itu terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dana alokasi khusus secara

fluktuatif sejalan dengan pembangunan di daerah Kabupaten Buleleng.

Kecenderungan peningkatan biaya yang diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk mendanai bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur dan kehutanan maka penganggaran DAK diharapkan selalu mengalami peningkatan. Kecenderungan peningkatan anggaran dana alokasi khusus dari tahun ke tahun terjadi karena adanya rencana dari pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan belanja modal pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, program keluarga berencana dan kehutanan. Penurunan dana alokasi khusus terjadi pada tahun 2010 disebabkan karena adanya perencanaan pembangunan yang tidak berjalan sesuai rencana, atau keterlambatan dalam pencairan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Sejalan dengan penelitian oleh Anwar, (2012) yang menyatakan bahwa realisasi dana alokasi khusus meningkat secara fluktuatif dimana setiap tahun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena permasalahan pencairan dana alokasi khusus, dimana terdapat daerah yang terlambat dalam menyampaikan persyaratan yang diperlukan untuk pencairan dana alokasi khusus.

Kecenderungan Realisasi Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Periode 2009-2013.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Besaran pendanaan Belanja Modal secara spesifik dapat diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah (UU

Nomor 33 Tahun 2004) yaitu dari Penghasilan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DAK & DAU) dan sumber penghasilan lainnya misalnya hasil penjualan aset daerah. Realisasi Belanja Modal pemerintah kabupaten Buleleng dari tahun 2009 sampai 2013 yang mengalami kenaikan secara fluktuatif menunjukkan adanya sumber pendanaannya yang juga mengalami fluktuatif. Selain itu realisasi belanja modal juga tidak pernah mencapai target.

Kecenderungan realisasi belanja modal yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Buleleng, sejalan dengan penelitian oleh Baihaqi & Khotimah (2009) dalam penelitiannya yang berjudul hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah kabupaten/kota menyatakan bahwa keputusan untuk meningkatkan belanja modal merupakan bagian dari keinginan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, yang diikuti dengan peningkatan belanja-belanja lain, seperti belanja pemeliharaan. Namun, bukan berarti belanja modal selalu sebagai penyebab atau predictor bagi kenaikan belanja pemeliharaan.

Peningkatan anggaran belanja modal dan realisasi belanja modal oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga terlihat dari grafik belanja modal dari tahun 2009 sampai 2013 terdapat kecenderungan dari pemerintah meningkatkan belanja modal dari tahun ke tahun. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian oleh Arsa (2015) dengan judul pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2006-2013 bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Dana alokasi khusus memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, peningkatannya bersifat fluktuatif. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh BAPPENAS (2011) bahwa untuk meningkatkan efektifitas pembangunan daerah, pemerintah memberikan bantuan dana berupa dana alokasi khusus kepada daerah yang memiliki kemampuan fiskalnya rendah, dimana sebagian besar DAU (Dana Alokasi Umum) habis terpakai untuk gaji pegawai. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang sangat mengharapkan dana alokasi khusus untuk pembangunan daerah, oleh karena itu terlihat dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dana alokasi khusus secara fluktuatif sejalan dengan pembangunan di daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kecenderungan realisasi belanja modal (BM) pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Kecenderungan realisasi belanja modal yang semakin meningkat disebabkan oleh adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemajuan pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Buleleng. Peningkatan anggaran belanja modal dan realisasi belanja modal oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah Kabupaten Buleleng, sehingga terlihat dari grafik belanja modal dari tahun 2009 sampai 2013 terdapat kecenderungan dari pemerintah meningkatkan belanja modal dari tahun ke tahun.

Saran

Pemerintah Kabupaten Buleleng seharusnya meningkatkan pencapaian realisasi dana alokasi khusus hingga 100% sehingga dapat mengoptimalkan untuk

pembiayaan belanja modal pemerintah, dengan cara membuat rencana yang efektif, *specific, measureable, acceptable*, dan *rational*.

Dengan meningkatnya kecenderungan belanja modal pemerintah tiap tahunnya, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dinyatakan dalam penelitian oleh Arsa (2015) dengan judul pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2006-2013 bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, YRH. 2012. Pengaruh dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan subsidi pangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Online. Tersedia pada <http://digilib.esaunggul.ac.id/public/EU-Master-72-11-%20Jurnal%20-F.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2015.
- Arsa, I Ketut. 2015. Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi pemerintah kabupaten/kota se-provinsi bali tahun 2006 s.d. 2013. Tesis. Denpasar : Universitas Udayana. Tersedia pada http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-1267-1228220008-tesis%20i%20k%20arsa.pdf. Diakses pada tanggal 15 Juli 2015.
- Baihaqi & Khotimah, H. 2009. Hubungan belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada pemerintah Kabupaten/Kota. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*. 7(3), tersedia pada <http://download.portalgaruda.org/article.php>. Diakses pada tanggal 15 Juli 2015.
- BAPPENAS. 2011. Analisis Perspektif, Permasalahan, dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK) White Paper.

Online. Tersedia pada
www.bappenas.go.id. Diakses pada
tanggal 15 Juli 2015.

Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Sektor
Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
Salemba Empat: Jakarta.

Kawedar, warsito. 2008. Akuntansi Sektor
Publik, Semarang UNDIP

Kurniawan, Kindy.2012. Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi
Khusus terhadap Kinerja Keuangan
dengan Belanja Modal sebagai
Variabel Intervening di Kab/Kota
Provinsi Riau. Tesis. Medan.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang-
Undang No. 22 Tahun 1999
Tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang No. 25 Tahun 1999
Tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan
Daera., Bandung : Kuraiko Pratama.

Peraturan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2008 Tentang Pedoman
Penggunaan Akun Pendapatan,
Belanja Pegawai, Belanja Barang,
Dan Belanja Modal Sesuai Dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK 05 / 2007 Tentang Bagan
Akun Standar

Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sugiyono. 2010. *Statistika untuk penelitian*.
Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian
Kuantitatif dan R&D*.
Bandung:Alfabeta

Undang-undang No. 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah. Tim
Pustaka Yustisia.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan